

MODEL PENINGKATAN KAPABILITAS SUMBER DAYA APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DI JAWA BARAT

Oleh.

Nurdiana Mulyatini

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis

email : dianamulyana@gmail.com

ABSTRAK

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (clean government). Efektivitas peran APIP menuntut kapabilitas APIP yang memadai yang memenuhi persyaratan tata kelola organisasi. Internal Audit Capability Model (IA-CM) menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam pengawasan intern yang efektif. Penelitian dengan analisis deskriptif ini bertujuan memberikan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan oleh para pengawas intern sehingga mampu memberikan jaminan dalam pencegahan pelanggaran dan pengelolaan pemerintahan.

Keyword : *Aparat Pengawas Intern, Kapabilitas APIP, Good Governance*

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, pemerintah memerlukan peran lembaga yang efektif yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggaraan negara yang profesional, handal dan kompeten. (Afiah & Azwari, 2015). Hal itu seiring dengan tujuan dari Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana tujuan Reformasi Birokrasi yaitu melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*)(Nofianti & Suseno, 2014).

Di Indonesia salah satu lembaga yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap jalannya penyelenggaraan negara tersebut yaitu BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014, BPKP

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional yang salah satu fungsinya yaitu melakukan pengawasan intern yang terdiri dari 1) pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah , 2) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan asset negara/daerah, 3) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kegiatan yang strategis, 4) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang menghambat kelancaran pembangunan,, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi, 5) pelaksanaan review atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat, dan 6)

pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPKP memiliki SDM pengawasan yang disebut dengan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan mandat yang dimilikinya, Dalam rangka mewujudkan kualitas akuntabilitas dan tata kelola keuangan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dimana peran APIP yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah, serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. (Yohanes, Paton, & Alaydrus, 2016) Fakta dilapangan, fungsi APIP masih kurang “menggigit” dikarenakan Laporan Hasil Audit tergantung dari stakeholder dalam hal ini Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut. (Yurniwati & Rizaldi, 2015).

Selain itu berdasarkan hasil assesment kapabilitas APIP tahun (2010-2015) oleh BPKP menunjukan bahwa 404 atau 85,23% APIP masih berada pada level 1 (*initial*), 69 APIP atau 14,56% berada pada level 2 (*infrastructure*) dan hanya 1 APIP atau 0,21% berada pada Level 3 (*integrated*), dimana dengan kondisi tersebut menunjukan APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah tindak pelanggaran. (Lumbantobing, Saerang, & Wokas, n.d.)

II. METODOLOGI

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang berusaha memaparkan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kapabilitas APIP serta menggambarkan model peningkatan kapabilitas APIP. Dengan tahap yang dilakukan yaitu 1) Observasi lapangan, 2) Melakukan Pemetaan Lapangan (Penentuan Lokasi yang sesuai dengan desain penelitian), 3) Analisis *Grounded Theory* (*Literatur Review*). Untuk mempermudah dalam merepresentasikan hasil penelitian ini penulis menggunakan 1 wilayah pengawasan (Inspektorat Propinsi Jawa Barat), pemilihan lokasi tersebut dengan alasan berdasarkan hasil assesment BPKP provinsi Jawa Barat 85,25% APIP masih berada pada Level 1. Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mampu memberikan jaminan dalam pencegahan pelanggaran dan pengelolaan pemerintahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan pemetaan lapangan terkait dengan peningkatan kapabilitas APIP dibawah ini digambarkan kondisi terkini Sumber Daya Manusia APIP baik dari aspek kualitas maupun kuantitas serta kompetensi APIP di Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Sumber Daya Manusia APIP

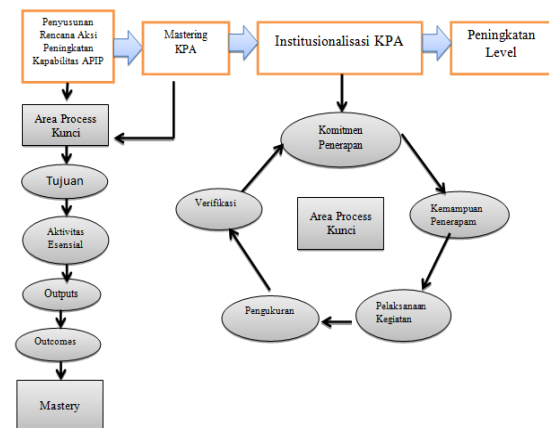
No	Kategori SDM APIP	Kondisi saat ini
1) SDM Pengawasan		
a.	Jabatan Struktural	9
b.	Jabatan Fungsional Auditor dan Pelaksana Pengawasan	53
c.	Jabatan Fungsional Tertentu P2UPD	18
2) SDM Penunjang (Ketatausahaan)		
a.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	-
b.	Jabatan Fungsional Perencana	-
c.	Jabatan Fungsional Arsiparis	1
d.	Jabatan Fungsional Pustakawan	-
e.	Jabatan Fungsional Umum	40
Total		121

Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Barat, 2016

Berdasarkan data yang ada dari jumlah SDM Pengawasan Inspektorat provinsi Jawa Barat, pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang memiliki jenjang S1 sebanyak 49 orang (,45%) dari total JFA, serta sebanyak 24 orang (45,28%) dari total SDM Pengawasan berlatar belakang Pendidikan Sosial Politik/Pemerintahan. Sedangkan Sebanyak 51 orang atau 96 ,24% dari jumlah SDM Pengawasan Jabatan Fungsional Auditor telah bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor.

Tentu saja dari gambaran kondisi yang ada SDM APIP masih jauh dari Level yang diharapkan, untuk itu dibawah ini digambarkan langkah dalam mewujudkan hasil yang diinginkan melalui Mastering Key Process Area (KPA) dan institusionalisasi KPA sebagai berikut :

Gambar 1 Langkah-Langkah Peningkatan Kapabilitas APIP



Berdasarkan langkah-langkah tersebut untuk meningkatkan kapabilitas APIP perlu pengembangan secara mandiri (Self Improvement) dengan tahapan : 1) Komitmen penerapan melalui penyusunan kebijakan (*Commitment to perform*), 2) Kemampuan penerapan dengan penyediaan sumber daya manusia yang memadai (*ability to perform*), 3) Pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan (*activities Performed*), 4) Pengukuran peningkatan kapabilitas APIP (*Measurement*), 5) Verifikasi untuk menilai peningkatan Kapabilitas APIP (*Verification*).

Selanjutnya melihat kondisi APIP saat ini yang mayoritas berada pada level 1 dan level 2, dengan langkah-langkah tersebut dapat ditingkatkan pada level 3 (*Integrated*). Dimana dengan capaian kapabilitas APIP pada level 3 APIP mampu memberikan layanan *compliance auditing*, *performance auditing* dan *practice advisory* sehingga APIP diharapkan mempunyai karakteristik : 1) APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai atas, ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah (*assurance activities*), 2) APIP mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*), 3) APIP mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

IV. SIMPULAN

Berdasarkan berbagai permasalahan tentang proses pengelolaan pemerintahan yang baik serta kapabilitas APIP, maka agar terwujud APIP yang efektif dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai diperlukan suatu kerangka kerja yang dapat mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan dalam pengawasan intern sektor publik. *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* menggambarkan jalur evolusi disektor publik untuk mengembangkan pengawasan intern yang efektif dan profesional serta mampu memberikan arah bagi para pengelola untuk meningkatkan kapabilitas APIP secara mandiri (*Self Improvement*).

V. DAFTAR PUSTAKA

Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in South Sumatera. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 811–818.

- <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>
Ahmi, A., Saidin, S. Z., & Abdullah, A. (2014). IT Adoption by Internal Auditors in Public Sector: A Conceptual Study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 591–599. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.151>
- Boyton, Johnson, Kell (2003) *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh, Jilid 2, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gamayuni, R. R. (2015). Efektivitas Fungsi Audit Internal: Faktor yang mempengaruhi, dan Implikasinya terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survei Pada Inspektorat Pemerintah Provinsi / Kota / Kabupaten di Pulau Jawa). *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lmpung*, (2), 1–30.
- Indra Bastian (2010). *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Journal, I., & Vol, S. S. (2014). Good Corporate Governance and Organisational Performance : An Empirical Analysis Adebayo, Mudashiru Department of Accounting and Finance Faculty of Management Sciences Lagos State University Nigeria Ibrahim, A. O. Bakare Department of Economics Facult. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(7), 170–178.
- Lumbantobing, J. H. ., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. (n.d.). Analisis Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Pengawasan keuangan Daerah, 37–49.
- Mohd Khirul Azwan Mohd Kamal, Romle, A. R., & Yusof, M. S. (2015). Good Governance and Organization Performance in Public Sector : A Proposed Framework. *International Journal of Administration and Governance*, 1(4), 63–68.
- Nofianti, L., & Suseno, N. S. (2014). Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and their Implications towards Performance Accountability. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 98–105. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.056>
- Ruhbaniah, A. (2012). Determinan Kinerja Auditor Internal Pada Inspektorat Se-Pulau Lombok, (80), 66–84. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i1.2048>
- Rully Indrawan, dkk (2016) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*; Penerbit PT Refika Aditama, Bandung
- Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian & Pengembangan (Research & Development)*, Penerbit Alfabeta Bandung
- Theodorus M. Tuanakotta (2013) *Audit Berbasis*

ISA (International Standards on Auditing),
Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Yohanes, E., Paton, A., & Alaydrus, A. (2016).
Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan. *eJournal Administrative Reform*, 4(1), 65–78.

Yurniwati, & Rizaldi, A. (2015). Control Environment Analysis at Government Internal Control System: Indonesia Case. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 844–850.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.111>

BPKP Propinsi Jawa Barat, (2016), Pedoman Tekhnis; Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Secara Mandiri (*self Improvement*)

Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat 2015-2019.